



2023

Laporan Kinerja

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi





LAPORAN KINERJA

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun 2023

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2023. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2023.

Jakarta, 26 Januari 2024
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



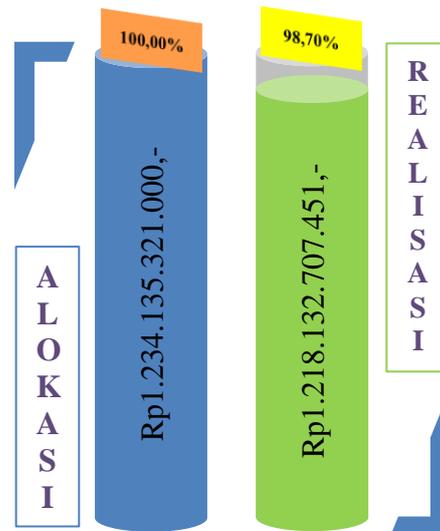
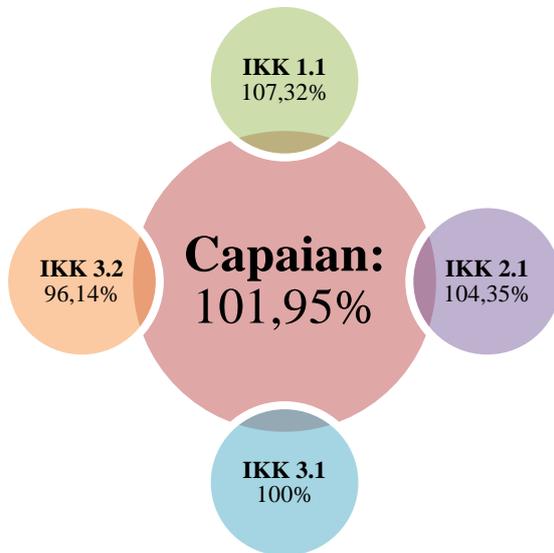
Wardani Sugiyanto

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I - Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	2
1. Tugas	2
2. Fungsi	2
3. Struktur Organisasi.....	3
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	3
1. Isu-isu Strategis	3
2. Peran Strategis.....	4
BAB II - Perencanaan Kinerja	5
BAB III - Akuntabilitas Kinerja.....	10
A. Capaian Kinerja.....	10
1. Sasaran Kegiatan 1	10
a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1	11
2. Sasaran Kegiatan 2	14
a. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1	14
3. Sasaran Kegiatan 3	18
a. Indikator Kinerja Kegiatan 3.1	18
b. Indikator Kinerja Kegiatan 3.2	19
B. Realisasi Anggaran.....	21
1. Capaian Anggaran	21
2. Efisiensi Anggaran	23
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative.....	23
1. Inovasi	23
2. Penghargaan	24
3. Program Crosscutting/Collaborative	24
BAB IV - Penutup	26
Lampiran	28

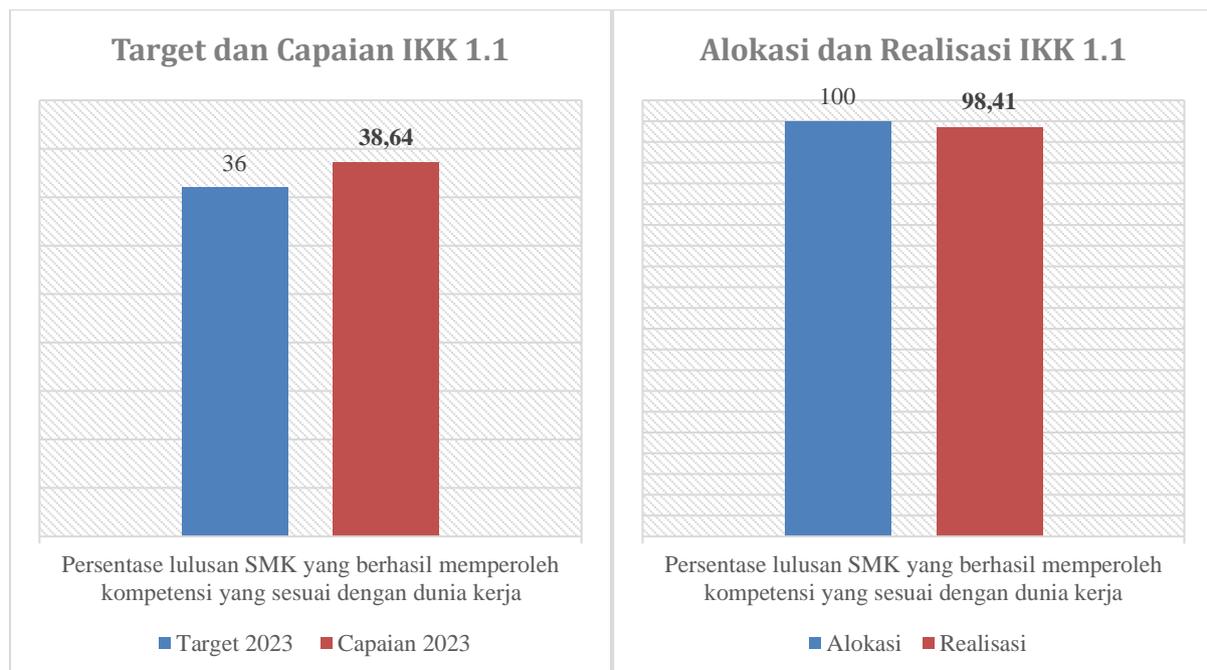
Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

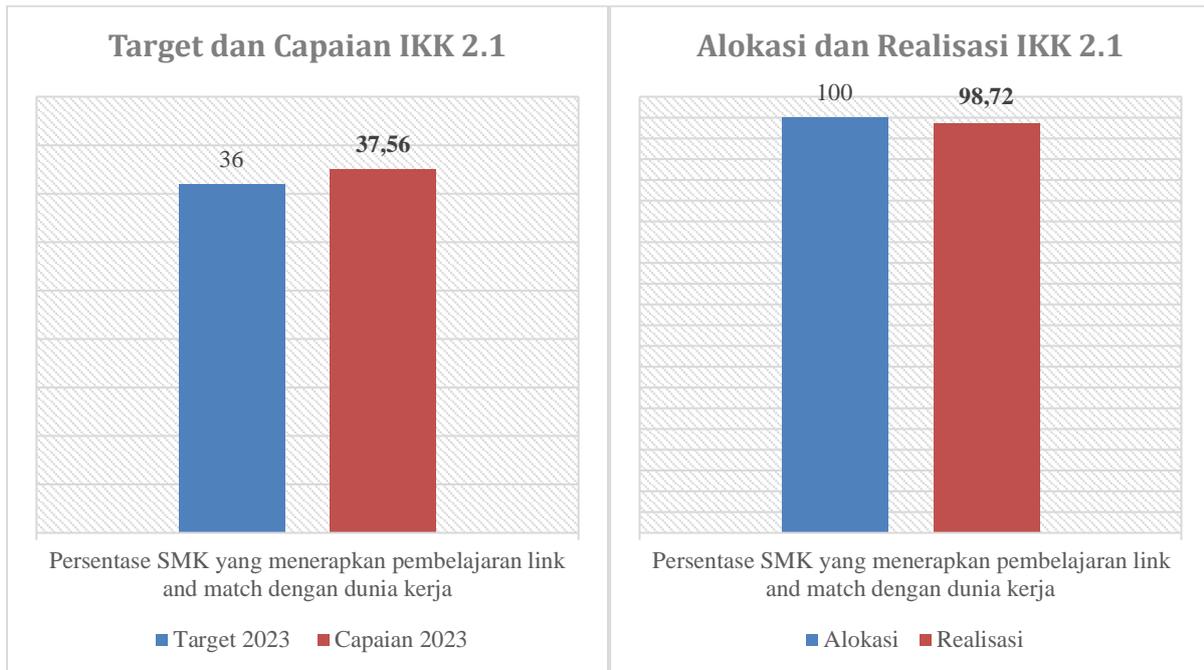


Sumber Realisasi Anggaran: MoLK per tanggal 17 Januari 2023

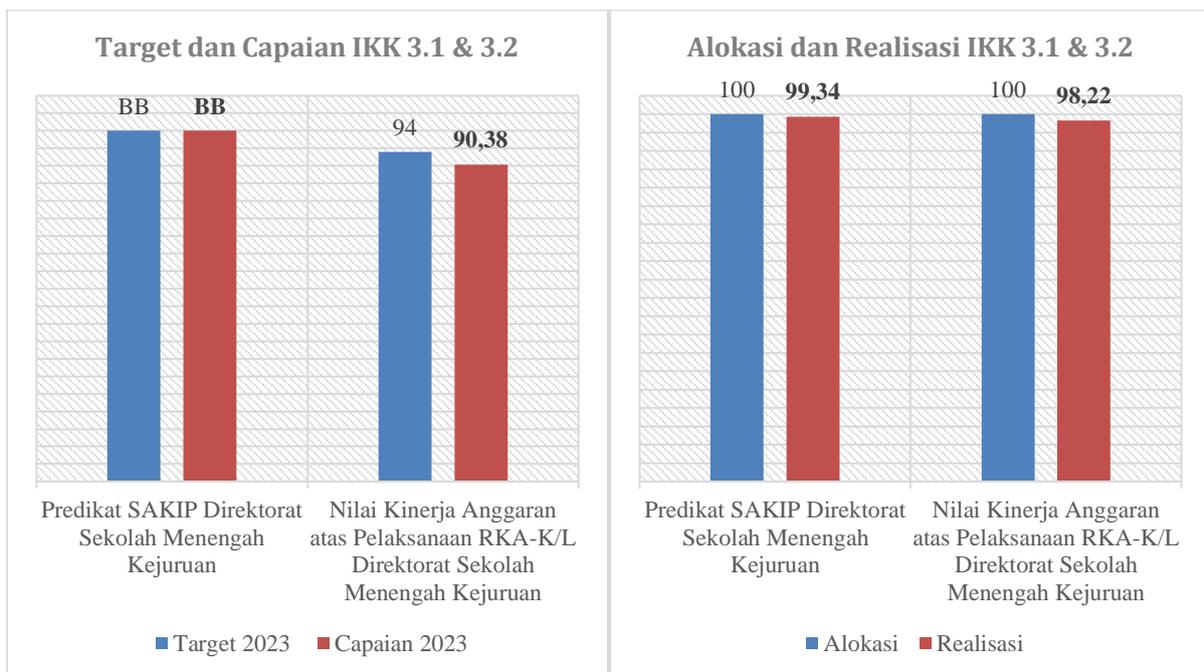
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja



[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja



[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Pada IKK 1 terkait persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja merupakan peserta didik yang mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan masa studi di SMK. Dalam hal ini intervensi yang dapat diberikan Direktorat SMK hanya sebanyak 2% dari populasi lulusan SMK, sehingga diperlukan pengumpulan pendataan lainnya untuk menghitung ketercapaian yang diberikan dari sumber intervensi lainnya. Untuk memenuhi data yang diperlukan maka perlu dilakukan upaya menggali dari sumber-sumber data yang dapat untuk dipertanggungjawabkan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk pengumpulannya.
2. Berkaitan dengan persentase SMK yang menerapkan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja merupakan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya satuan pendidikan SMK diarahkan untuk mempunyai mitra dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, sehingga dalam implementasi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada saat masuk ke pasar kerja. Namun tidak semua mitra kerja sama Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai SDM yang cukup dan mumpuni untuk melaksanakan kolaborasi terkait penerapan pembelajaran *link and match* di sekolah. Di samping itu, masih minimnya pengisian data Dapodik terkait isian pelaksanaan kurikulum menjadikan pengumpulan data pendukung untuk menghitung capaian kinerja memerlukan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Data hasil capaian dibutuhkan diharapkan dapat digali melalui sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya dikumpulkan dari sumber utamanya yaitu pihak SMK penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui pelaporan hasil pelaksanaan program yang kemudian diolah untuk mengetahui korelasi dengan kebutuhan terkait capaian indikator yang diukur. Tentunya perlu waktu untuk melakukan reviu dari laporan yang disampaikan oleh satuan pendidikan sebagai penerima manfaat langsung dari program, hal ini dikarenakan laporan yang disampaikan dapat berbeda meskipun
2. Dunia usaha dunia industri yang menjadi mitra pendamping bagi SMK dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kurikulum dan pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dapat menunjang tercapainya bisnis proses di industri secara optimal. Melalui penentuan kriteria standar untuk lulusan SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri, maka dapat dicarikan model-model pembelajaran dengan dampak paling optimal untuk menciptakan SDM berkompeten. Kurikulum merdeka sangat memungkinkan model pembelajaran di SMK dapat disusun bersama dengan mitra industri sesuai dengan bidang keahlian di satuan pendidikan tersebut.

BAB I - Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan peraturan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan merupakan satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pertama kali dibentuk pada Desember 2019 sesuai dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2019. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang direktur dengan jumlah SDM sebanyak 100 orang ASN (98 orang PNS dan 2 orang PPPK) dan 99 orang PPNPN. Wilayah kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melingkupi seluruh sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SMK, maka Direktur dan Kasubbag Tata Usaha, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dibantu oleh lima tim kerja. Pembagian tim kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMK yakni tim kerja Program, Data, dan Evaluasi; Penjaminan Mutu Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penilaian; Penjaminan Mutu Peserta Didik dan Tata Kelola; Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pendidik & Tenaga Kependidikan; dan Kerja Transformasi SMK sebagai Pusat Keunggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMK dituntut untuk melaksanakannya dengan bijak, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut termasuk diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat SMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemendikbud. LAKIN Direktorat SMK sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat SMK, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat SMK.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas: melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau Lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat

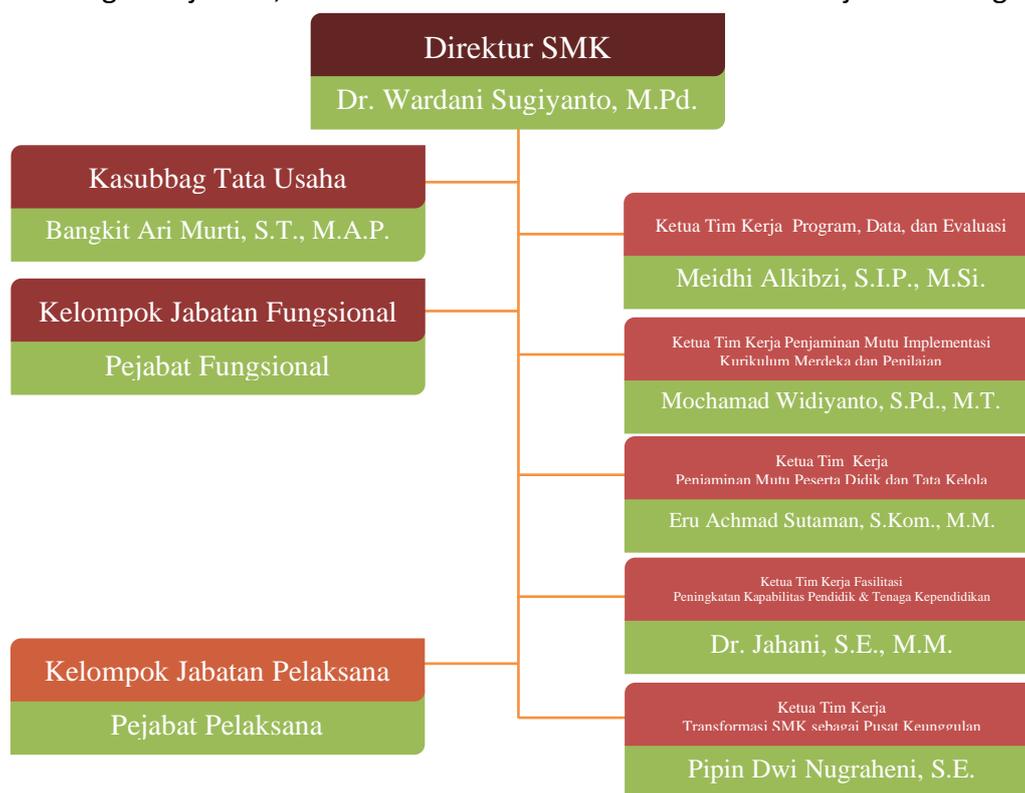
2. Fungsi

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- d. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan;
- f. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat SMK terdiri dari tata usaha dan jabatan fungsional.



Gambar 1.1. Daftar Pejabat dan Ketua Tim Dit. SMK

Ada lima tim kerja yang dibentuk yang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat SMK. Setiap tim kerja beranggotakan oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dibagi sesuai dengan kebutuhan tugas dari masing-masing tim kerja.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Direktorat SMK pada tahun 2023 berdasarkan di antaranya adalah:

- Perubahan dari *supply driven* menjadi *demand driven* merupakan kebijakan strategis dalam upaya melakukan *link and match* antara lulusan SMK dengan dunia kerja. Adanya transformasi pada pendidikan kejuruan ini mengharuskan Direktorat SMK untuk berupaya lebih maksimal dalam memfasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
- Pendidikan kejuruan yang kontekstual dibutuhkan agar dapat bertransformasi serta lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan dunia kerja. Maka dengan begitu pendidikan kejuruan dapat menjadi salah satu strategi dalam penyiapan dan pemenuhan SDM terampil di Indonesia.
- Penguatan tata kelola pendidikan SMK melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek (*project base learning*), pembelajaran berbasis pabrik (*teaching factory*), serta pembentukan kelembagaannya melalui BLUD untuk peningkatan hasil pembelajaran peserta didik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

- d. Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan pengetahuan dasar apabila melihat hasil yang diperoleh dari PISA yang hal ini merupakan gambaran umum dari pendidikan sehingga menjadi tanggung jawab semua pemangku kebijakan.
- e. Adanya pengembangan industri 4.0 serta dicanangkannya program pemerintah Making Indonesia 4.0 mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga kerja berkeahlian yang mendukung teknologi industri terkini. SMK harus dapat melakukan adaptasi pembelajaran dan pembekalan kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, untuk kemudian mendorong lulusannya siap dengan peran serta sebagaimana kebutuhan kompetensi di pasar kerja.

2. Peran Strategis

- a. Jumlah SMK secara nasional lebih dari 14.000 satuan pendidikan yang tersebar secara nasional memerlukan adanya fasilitasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kebijakan pusat dalam implementasi kebijakan. Di samping itu, masih perlu ditingkatkan pemahaman dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan dan program Kemendikbudristek seperti kebijakan merdeka belajar, program SMK Pusat Keunggulan, fleksibilitas penggunaan dana BOS, pembelajaran paradigma baru, hingga tujuan dan konsep dasar dari pelaksanaan Asesmen Nasional.
- b. Pekerja yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah (36,82 persen atau 51,49 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah kejuruan mencapai 9,60 persen. Akses informasi pasar kerja kepada lulusan SMK perlu ditingkatkan lagi dengan melibatkan pihak terkait supaya dapat menyediakan informasi tentang tren pekerjaan dan kebutuhan industri.
- c. Dukungan untuk Kawasan Industri (KI) yang mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama dan penguatan pendidikan vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah.
- d. Di antara rencana kerja pemerintah adalah berupa penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor.

BAB II - Perencanaan Kinerja

Sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengemban amanat meningkatkan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Berlandaskan Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045 maka Direktorat SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki Visi 2020-2024 adalah:

“Membangun dan mewujudkan Pendidikan Kejuruan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”

Visi tersebut akan diwujudkan dengan berbagai langkah yang mengacu kepada 3 (tiga) misi berikut:

- Mewujudkan pendidikan kejuruan yang berkualitas tinggi, relevan merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan kejuruan.

Tujuan Kinerja:

Tujuan pendidikan menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan merupakan derivasi dari tujuan penyelenggaraan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Tujuan ini juga mendukung dari arahan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi dasar program kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan selama tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik SMK yang berkeadilan dan inklusif
- Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan SMK yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan sasaran, indikator dan target untuk perjanjian kinerja hingga tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Direktorat SMK

Kode	Uraian	Satuan	Baseline 2020	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40
2.0	<u>Sasaran Kegiatan</u> Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja					
IKK 2.1	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target SK dan IKK Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	36
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	36
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94

Tabel 2.3. Anggaran SK dan IKK Perjanjian Kinerja Awal

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	32.733.896.000
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	899.078.355.000
TOTAL		931.812.251.000

Seiring dengan berjalannya perencanaan dan pelaksanaan program selama tahun 2023, Direktorat Sekolah menengah kejuruan mendapatkan tambahan anggaran BA BUN dengan penambahan target pada tingkat Rincian Output pada RKAKL. Penambahan anggaran tersebut mengubah pagu Direktorat SMK sehingga perlu disusunnya Perjanjian Kinerja baru yang dituangkan sesuai dengan Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.4. Target SK dan IKK Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	36
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	36
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94

Tabel 2.5. Anggaran SK dan IKK Perjanjian Kinerja Akhir

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	31.228.345.000
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.202.906.976.000
TOTAL		1.234.135.321.000

Program-program Prioritas

Pada tahun 2023, Direktorat SMK memiliki 5 prioritas nasional di kategori 03: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Prioritas nasional ini juga sekaligus menjadi program prioritas Direktorat SMK yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja Direktorat SMK. Ada pun program-program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK adalah upaya mencetak lulusan tersertifikasi yang diakui dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang penyelenggaraan sertifikasinya diselenggarakan atau dikoordinasikan oleh SMK.

Tabel 2.6. Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Program	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	46.891	46.960	46.960	100,00

Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia SMK; menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan Dunia Kerja yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri; meningkatkan akses bagi siswa dan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan, ujian, dan mendapatkan sertifikat kompetensi; dan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK dalam rangka penyelarasan skema dan program sertifikasi kompetensi.

2. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan

SMK Pusat Keunggulan adalah program pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu melalui peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyalarsan dengan Dunia Kerja, serta menjadi rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

Tabel 2.7. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan

Program	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1.401	1.851	1.851	100,00

Secara umum, tujuan SMK Pusat Keunggulan adalah untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

3. SMK yang Melaksanakan Program UKS

Kegiatan UKS secara prinsip adalah untuk pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat. Kampanye Sekolah Sehat merupakan segala upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus oleh semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, para mitra, satuan pendidikan, masyarakat pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya penerapan Sekolah Sehat.

Tabel 2.8. SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan

Program	Target 2023	Capaian 2023	%
SMK yang Melaksanakan Program UKS	34	34	100,00

**program ini tidak ada pada tahun 2022*

Tujuan Kampanye Sekolah Sehat adalah agar seluruh ekosistem satuan pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dapat menerapkan dan membudayakan Sekolah Sehat dengan fokus berfokus pada Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi di satuan pendidikan.

4. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Program SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan adalah upaya menjadikan sekolah sebagai lembaga pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan menjadi wirausahawan muda.

Tabel 2.9. SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Program	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan	101	240	240	100,00

Kewirausahaan				
---------------	--	--	--	--

Tujuan program ini adalah untuk mendorong kreativitas siswa dalam mengembangkan produk yang bernilai jual; meningkatkan jumlah siswa yang berwirausaha setelah lulus dari SMK; dan meningkatkan *soft-skill* lulusan SMK melalui pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan.

5. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri 4.0 adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK berbasis digitalisasi pada proses penguatan pembelajaran dan/atau pemenuhan peralatan praktik dan/atau pengembangan ruang praktik siswa berbasis industri 4.0.

Tabel 2.10. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Program	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	56	31	80	258,06

Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan melalui pemberian bantuan prasarana untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja; membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik kejuruan yang berkualitas, sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya; dan memberikan bekal bagi peserta didik SMK agar mempunyai keahlian yang berbasis Industri 4.0.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Direktorat SMK

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Target 2024
Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	36	38,64	107,32	40
Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	36	37,56	104,35	48
Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	BB	100	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94	90,35	96,12	95

1. Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Peningkatan kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program-program yang dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk Direktorat SMK, dalam pengembangan pendidikan SMK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai program telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini.

Kompetensi, menurut SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, didefinisikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sementara itu, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mendefinisikan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja adalah sebagai uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dan peran industri dalam pendidikan SMK, termasuk pengembangan insentif dan regulasi. Koordinasi intensif dengan industri juga dilakukan untuk memetakan kebutuhan keahlian dan memperkuat informasi pasar kerja di setiap wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Salah satu hal yang menjadi landasan apakah lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yaitu melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kompetensi lulusan itu sendiri yang juga merupakan salah satu kegiatan Direktorat SMK yang tertuang pada indikator kegiatan berikut.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Tolak ukur keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari jumlah lulusan SMK yang dapat diterima di dunia kerja. Salah satu strategi agar lulusan SMK dapat diterima di dunia kerja siswa SMK perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu indikator siswa telah kompeten bisa dilihat dari pengakuan Dunia Kerja/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terhadap kompetensi siswa tersebut melalui pemberian sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keikutsertaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari dunia industri yang diakui.

Kategori dunia industri yang diakui adalah industri dengan kategori minimal industri sedang yang merupakan industri dengan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu.

Pelaksanaan sertifikasi terhadap siswa merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang SNP SMK/MAK pada Lampiran IV tentang Standar Penilaian.

Metode penghitungan capaian IKK 1.1 adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{A}{B} * 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

A = Jumlah siswa SMK kelas 12/13 tersertifikasi kompetensi dari LSP dan/atau sertifikasi PKL dari dunia industri yang diakui

B = Jumlah populasi siswa SMK kelas 12/13

Capaian dihitung berdasarkan jumlah siswa kelas 12/13 dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendapatkan bantuan program SMK Pusat Keunggulan dan Industri 4.0, ditambah dengan intervensi bantuan sertifikasi kompetensi dari Direktorat SMK.

Per Desember 2023, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat 567.202 siswa untuk SMK Pusat Keunggulan dan 25.300 siswa untuk SMK Industri 4.0. Selain itu, 23.927 siswa dari total 30.000 siswa telah mendapatkan bantuan sertifikasi. Angka 23.937 ini diperoleh setelah pengurangan jumlah awal dengan jumlah siswa yang ada pada SMK Pusat Keunggulan dan SMK Industri 4.0.

Setelah dijumlahkan, total siswa adalah 616.429 siswa. Sementara itu, jumlah populasi siswa SMK kelas 12/13 per Desember 2023 adalah sebanyak 1.595.495 siswa. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1.1 adalah 38,64%, yang menunjukkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024
Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	34,87	36	38,64	107,32	40

Beberapa kegiatan lainnya yang mendukung agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya:

- 1) Telah dilakukan penyusunan pedoman magang/PKL siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar semua lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- 2) Telah dilaksanakannya bantuan terkait kegiatan sertifikasi kepada sebanyak 30.000 siswa yang telah disertifikasi kompetensi dan 16.960 siswa untuk sertifikasi bahasa asing;
- 3) Dilaksanakannya reviu dan verifikasi terhadap kompetensi keahlian yang akan diberikan sertifikasi kepada siswa SMK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan dan Industri 4.0 yang di dalam bagian kegiatannya adalah untuk memperkuat kerja sama dengan industri termasuk seperti melakukan sertifikasi terhadap siswa yang akan dan/atau telah lulus serta penerimaan siswa PKL pada industri tersebut.



Gambar 3.1. Salah Satu Proses Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Kesehatan Keahlian Keperawatan



Gambar 3.2. Salah Satu Proses Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Tata Kecantikan Kulit dan Rambut

Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Mitra Industri pada SMK Pusat Keunggulan beberapa belum mempunyai lembaga sertifikasi secara mandiri untuk melaksanakan proses sertifikasi kepada siswa
- 2) a SMK.
- 3) Sementara untuk sertifikasi kepada Siswa SMK terkendala pada belum banyaknya lembaga/institusi yang melakukan sertifikasi pada bidang-bidang tertentu sebagai bentuk peningkatan Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.
- 4) Lembaga sertifikasi LSP-P1 SMK belum tersebar menyeluruh secara nasional, sehingga sebagian besar siswa yang berada di daerah belum dapat terjangkau untuk mendapatkan sertifikasi.

Tindak lanjut terkait kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Menyarankan agar perguruan tinggi yang berperan sebagai pendamping Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) dapat berinisiatif dalam membantu mencari lembaga sertifikasi yang relevan dengan dunia kerja, sehingga dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 2) Mendorong kepada SMK agar terus mempersiapkan siswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja bersama dengan melibatkan mitra industri terutama dalam hal proses pembelajaran, seperti penyusunan kurikulum, pembelajaran berbasis proyek riil, peningkatan peran guru/instruktur dari industri, dan praktik kerja lapangan.

Strategi yang dapat dilakukan ke depannya terkait dengan sertifikasi lulusan SMK adalah dengan melalui pelibatan dunia kerja terutama industri mitra untuk dapat memberikan *training* yang bersertifikat kepada siswa sehingga bentuk perolehan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Selain itu, rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Serta, mendorong dinas pendidikan

daerah untuk melakukan pembinaan dalam pendirian LSP-P1 di SMK sehingga pelaksanaan sertifikasi dalam tercapai merata secara nasional.

2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

Berbagai program di SMK dirancang untuk mempersiapkan siswa sesuai dengan perkembangan industri. Kegiatan ini diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa relevan dan berharga di tempat kerja.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhinya seperti penyesuaian kurikulum, guru tamu, pembelajaran berbasis pabrik (*teaching factory*), dan seterusnya. Semua kegiatan itu merupakan bagian dari 8+i *link and match*.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja

Link and Match merupakan konsep untuk menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini, *link and match* biasanya berhubungan dengan pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Konsep utama *link and match* dilakukan melalui keterlibatan dan kemitraan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dengan memperhatikan paket 8+i *link and match* (Kepmendikbudristek nomor 464/M/2022), meliputi:

- 1) Penyusunan dan penyesuaian kurikulum berbasis industri dan dunia kerja;
- 2) Pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia kerja (PBL) sejak awal;
- 3) Pelibatan guru/pengajar tamu *expert* dari industri atau dunia kerja ditingkatkan secara signifikan;
- 4) Penyelenggaraan magang/praktik kerja industri (Prakerin) minimal 1 semester;
- 5) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan;
- 6) Pelatihan Guru/pengajar secara rutin mendapatkan *update* teknologi dan *training* dari dunia kerja;
- 7) Pembuatan komitmen dengan dunia kerja terhadap penyerapan lulusan SMK;
- 8) Pemberian Beasiswa dan/atau Ikatan Dinas dari dunia kerja untuk siswa SMK serta donasi dari DUDI dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya, bagi pendidikan vokasi; dan
- 9) Riset Terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI dan masyarakat.

SMK dikategorikan *link and match* dengan dunia kerja ketika memenuhi minimal 4 aspek dari 8+i aspek yang telah tertuang dalam Kepmendikbud.

Metode penghitungan capaian IKK 2.1 adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{A}{B} * 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja

A = Jumlah SMK yang sudah melakukan pembelajaran *link and match* dengan dunia kerja

B = Jumlah total SMK

Capaian IKK 2.1 pada tahun 2023 diperoleh dari hasil rapor pendidikan tahun 2023 terkait dengan melihat pada indikator Kemitraan dan Keselarasan SMK dengan Dunia Kerja. Capaian pada indikator tersebut dibagi menjadi ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh oleh SMK yaitu baik, sedang, dan kurang.

Jumlah SMK yang dihitung untuk memenuhi capaian IKK 2.1 adalah SMK yang masuk ke dalam kategori baik dan sedang. Seluruh SMK pada kategori baik dihitung yaitu sebanyak 2.862 SMK, sedangkan jumlah SMK yang dihitung pada kategori sedang adalah koefisien atas kategori sedang yaitu sepertiga atas atau sebanyak 2.548 SMK. Sehingga totalnya adalah 5.410 SMK.

Jumlah SMK keseluruhan berdasarkan Dapodik per Desember 2023 adalah 14.402 SMK. Menggunakan cara penghitungan capaian sesuai definisi operasional, maka 5.410 SMK adalah sebesar 37,56% dari 14.402 SMK.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024
Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	28,61	36	37,56	104,35	48

Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut di atas beberapa program, di antaranya:

- 1) SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan kegiatan berupa koordinasi awal dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan telah disusun dan diajukannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan, serta sebanyak 240 SMK telah ditetapkan.
- 2) SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan berupa penerbitan juknis bantuan pemerintah SMK PK Tahun 2023. Pelaksanaan seleksi SMK PK Tahun 2023 mulai dari pembukaan pengajuan SMK PK tahun 2023 oleh SMK hingga proses seleksi dan penentuan serta pengajuan untuk pembuatan SK penetapan sebanyak 1.851 SMK.

- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 kepada sebanyak 80 SMK yang terdiri dari SMK yang baru pertama kali mengikuti program dan SMK yang sudah pernah mendapatkan di tahun sebelumnya.
- 4) Sosialisasi kebijakan kepada SMK terkait mendatangkan guru tamu/instruktur dari industri yang juga difasilitasi melalui dana BOS, penyesuaian kurikulum agar pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja, pemagangan guru ke dunia kerja serta pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang diharapkan melibatkan industri merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja.



Gambar 3.3. Salah Satu Kelompok Peserta Didik Penerima Modal dari Proyek Kreatif dan Kewirausahaan



Bengkel Lama **Bengkel Baru**
Gambar 3.4. Perubahan RPS pada Salah Satu SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan



Gambar 3.5. Bangunan Fisik pada Salah Satu SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Untuk mencapai target dari IKK ini, tidak lepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi di antaranya:

- 1) Pada SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan kendala yang dihadapi berupa mitra dunia kerja yang beberapa mengalami penurunan operasional sehingga program yang diagendakan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
- 2) Pelaksanaan program SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan kendala terkait terbitnya SK Penetapan SMK PK yang sedikit terlambat sehingga pelaksanaan oleh sekolah sedikit terlambat, sementara itu untuk banyaknya intervensi dari beberapa pihak terhadap SMK PK mengakibatkan tim sekolah kesulitan membagi SDM untuk mengikutinya.
- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 kendala yang dihadapi beberapa sekolah dikarenakan beberapa industri yang mendukung berlokasi cukup jauh dari sekolah sehingga koordinasinya belum maksimal.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan tersebut Direktorat SMK mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 2) SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3) SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Strategi yang bisa dilakukan ke depan untuk meningkatkan SMK yang menerapkan *link and match* adalah dengan melibatkan semua *stakeholder*, dalam hal ini adalah SMK; dinas pendidikan; dunia kerja; dan Kemendikbudristek, untuk melakukan koordinasi secara terus menerus sehingga pengembangan SMK dapat secara menyeluruh dan sesuai dengan tujuan dari adanya SMK itu sendiri.

3. Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial, terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini dapat dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.



Gambar 3.6. Indikator pengukuran prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

Pada SK 3 terdapat dua IKK yaitu IKK 3.1 dan IKK 3.2 yang di antara dua IKK tersebut hanya IKK 3.1 yang tercapai sesuai target pada perjanjian kinerja dan sedangkan IKK 3.2 tidak tercapai dan mengalami penurunan daripada capaian tahun lalu. Untuk perinciannya, dapat dilihat pada uraian masing-masing IKK tersebut di bawah.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Akuntabilitas kinerja adalah bagian dari delapan program Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Ini diterapkan di semua instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Proses ini melibatkan perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada berbagai tingkatan organisasi.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Nilai SAKIP Direktorat SMK pada tahun ini adalah 75,35 dengan predikat BB interpretasi sangat baik. Secara predikat, nilai SAKIP Direktorat SMK masih sama dengan tahun lalu. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024
Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB	BB	BB	100,00	BB

Keberhasilan capaian dari IKK 3.1 disebabkan beberapa faktor yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi secara rutin sehingga ketercapaian nilai SAKIP dapat terpantau serta melakukan administrasi secara teratur dan berkala untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pendukung SAKIP;
- 2) Merencanakan pola kegiatan pemenuhan dan perbaikan dokumen SAKIP menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan.

Pada upaya pencapaian target IKK ini, masih ada terdapat kendala yaitu belum adanya SK Tim SAKIP Direktorat SMK sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi secara terpusat terutama dalam hal pengumpulan data pemenuhan dokumen SAKIP.

Dalam menyelesaikan kendala tersebut dilakukan dengan cara memaksimalkan pegawai yang ada untuk bisa menggantikan peran yang seharusnya pada Tim SAKIP sehingga proses pelaksanaan evaluasi SAKIP dapat berjalan dengan baik.

Strategi yang bisa dilakukan ke depan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi terkait pembentukan Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja dan diharapkan tahun berikutnya bisa dibentuk.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait di dalam Direktorat SMK untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang pada LHE.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 3.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Berdasarkan aplikasi SPASIKITA per tanggal 17 Januari 2024, Nilai akhir EKA Direktorat SMK adalah 97,72 dan nilai IKPA berdasarkan aplikasi OM SPAN per 17 Januari 2024 adalah 82,99. Menggunakan nilai tersebut menggunakan metode penghitungan NKA, diperoleh nilai Direktorat SMK sebesar 90,35. Dibandingkan dengan target dengan nilai 94, persentase capaian IKK 3.2 adalah 96,12%.

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	93,97	93	90,35	96,12	95

Capaian IKK tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yang secara langsung juga menyebabkan bahwa capaian target tahun ini tidak tercapai. Penyebab rendahnya capaian NKA Direktorat SMK sehingga tidak tercapainya target pada tahun 2023 dikarenakan nilai IKPA yang menjadi komponen penyumbang NKA capaiannya sangat rendah yaitu hanya senilai 82,99 sehingga tidak cukup untuk mendongkrak NKA walau nilai EKA sudah mencapai 97,72 yang sudah di atas target.

Beberapa kendala penyebab capaian NKA menjadi rendah antara lain:

- 1) Pada Kualitas Perencanaan Anggaran diketahui bahwa kesesuaian dan konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana penggunaan yang ditetapkan dalam DIPA masih terdapat deviasi yang cukup tinggi. Di antaranya untuk RPD pada halaman III DIPA yang disusun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk menghindari adanya penyimpangan dari target yang telah ditetapkan, sehingga satker terlambat untuk melakukan revisi halaman III DIPA setiap awal triwulan.
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Kemampuan satker dalam melakukan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA bergantung pada pihak lain yang menjadi penerima manfaat maupun mitra kerja sama. Hal ini mempengaruhi beberapa komponen di antaranya Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP/TUP yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu dalam pengelolaan administrasi dokumennya.

- 3) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang akuntabilitas, serta perubahan kebijakan yang mendadak sehingga beban kerja yang tidak seimbang.

Ada pun tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi oleh pengambil keputusan, tim perencana, dan tim keuangan terkait proses penyelesaian anggaran terhadap kegiatan sehingga konsistensi penyerapan dan realisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk selanjutnya, yaitu:

- 1) Penyerapan Anggaran: Memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat diserap dalam periode triwulanan.
- 2) Pengelolaan Data Kontrak: Memastikan kelengkapan data kontrak sehingga mencakup informasi tentang kontrak yang telah dilakukan, detail pihak yang terlibat, nilai kontrak, dan jangka waktu kontrak.
- 3) Mempercepat Penyelesaian Tagihan: Proses pembayaran tagihan atau *invoice* yang telah akan dipercepat. Termasuk proses verifikasi, persetujuan, dan pembayaran tagihan.
- 4) Mengoptimalkan Dispensasi SPM: Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar) adalah pengecualian yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu organisasi untuk melakukan pembayaran tanpa harus memiliki SPM. Dispensasi SPM biasanya diberikan dalam situasi tertentu dan harus melalui proses persetujuan tertentu.
- 5) Meningkatkan Koordinasi dan Kerja sama: Kerja sama dan koordinasi yang baik dilakukan terutama untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 6) Menggunakan Teknologi Pemantauan dan Evaluasi: Memaksimalkan penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan MoLK untuk memantau pelaksanaan anggaran di dalam satuan kerja.
- 7) Melakukan peningkatan kapasitas SDM keuangan agar pengelolaan anggaran di Direktorat SMK dapat lebih efektif dan efisien.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp1.234.135.321.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp1.218.132.707.451,- dengan persentase daya serap sebesar 98,70%.

Realisasi dari pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut perincian realisasi dan capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 3.6. Capaian Anggaran IKK Direktorat SMK

Uraian	Alokasi	Realisasi	%
[Kegiatan] Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.202.906.976.000	1.187.402.548.706	98,71

Uraian	Alokasi	Realisasi	%
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	21.417.583.000	21.077.080.850	98,41
[RO] Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	21.417.583.000	21.077.080.850	98,41
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja			
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan <i>pembelajaran link and match</i> dengan dunia kerja	1.181.489.393.000	1.166.325.467.856	98,72
[RO] SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1.092.037.155.000	1.077.193.694.571	98,64
[RO] SMK yang Melaksanakan Program UKS	3.525.074.000	3.478.094.451	98,67
[RO] SMK yang Mengembangkan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	13.805.924.000	13.613.899.000	98,61
[RO] SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	72.121.240.000	72.039.779.834	99,89
[Kegiatan] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	31.228.345.000	30.730.158.745	98,4
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan			
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	5.031.381.000	4.998.361.872	99,34
[RO] Layanan Umum	5.031.381.000	4.998.361.872	99,34
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	26.196.964.000	25.731.796.873	98,22
[RO] Layanan Perkantoran	24.991.387.000	24.526.310.873	98,14
[RO] Layanan Sarana Internal	1.205.577.000	1.205.486.000	99,99
TOTAL	1.234.135.321.000	1.218.132.707.451	98,70

Sumber: MoLK per tanggal 17 Januari 2023

Tabel 3.7. Capaian Kegiatan Dit. SMK

Uraian	Satuan	Target	Capaian	%
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN				
[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	36	38,64	107,32
Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	46.960	46.960	100,00
[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja				
[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	36	37,56	104,35
SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.851	1.851	100,00
SMK yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	34	34	100,00
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	100,00
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	Lembaga	31	80	258,06

Uraian	Satuan	Target	Capaian	%
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	BB	100,00
Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94,00	90,35	96,12
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00
Layanan Sarana Internal	Unit	200	162	81,00

Sumber: MoLK per tanggal 17 Januari 2023

2. Efisiensi Anggaran

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah mencapai efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2023, dengan total efisiensi mencapai Rp15.504.427.294,-. Efisiensi ini diperoleh dari dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu IKK 1.1 dan IKK 2.1, yang keduanya mencapai capaian 100% atau lebih.

Untuk IKK 1.1, anggaran yang dialokasikan adalah Rp21.417.583.000,-. Namun, realisasi penggunaan anggaran ini hanya mencapai Rp21.077.080.850,-. Dengan demikian, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp340.502.150,-. Ini berarti bahwa Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil menghemat sejumlah uang tersebut dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKK 1.1.

Sementara itu, untuk IKK 2.1, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1.181.489.393.000,-. Namun, realisasi penggunaan anggaran ini hanya mencapai Rp1.166.325.467.856,-. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dicapai adalah Rp15.163.925.144,-. Ini berarti bahwa Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil menghemat sejumlah uang tersebut dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan IKK 2.1.

Menjumlahkan efisiensi anggaran dari IKK 1.1 dan IKK 2.1, total efisiensi anggaran yang dicapai oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023 adalah Rp15.504.427.294,-.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

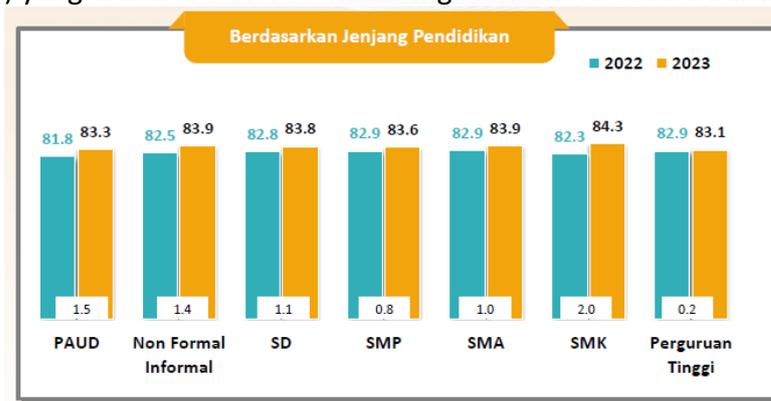
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan SMK, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mencoba melakukan inovasi dengan memberikan intervensi program melalui skema pepadanan dukungan yang melibatkan kerja sama dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Dengan adanya skema seperti ini dudi didorong memberikan investasi untuk membangun dan mengembangkan pendidikan SMK, sehingga *output*-nya berupa lulusan berkompeten yang siap masuk ke pasar kerja dapat terjadi.

Selain itu, dengan adanya peningkatan beban tugas yang diberikan kepada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu dilakukan upaya optimalisasi terhadap *resource* yang ada. Menindaklanjuti hal ini dilakukan dengan cara melakukan transformasi organisasi dengan membentuk kelompok kerja yang lebih teknis untuk

melaksanakan program/kegiatan, sehingga pelaksanaan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan optimal.

2. Penghargaan

Kemendikbudristek bekerja sama Lembaga Beerka melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan tahun 2023 terkait upaya untuk meningkatkan layanan prima (*service excellent*) di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu indikasi adanya keberhasilan program dan kebijakan Kemendikbudristek yang merupakan kepuasan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diukur melalui survei di tingkat nasional secara berkelanjutan.



Gambar 3.7. Grafis Indeks Kepuasan Pendidikan Berdasarkan Jenjang

Pada grafik untuk hasil survei terkait peningkatan indeks kepuasan bidang Pendidikan terlihat terjadi di semua jenjang Pendidikan. Namun, peningkatan paling tinggi terjadi pada jenjang SMK sekaligus menempati indeks paling tinggi dibandingkan jenjang yang lain. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi program beserta pelayanan yang diberikan oleh Direktorat SMK selaku mengampu pendidikan SMK mendapatkan apresiasi berupa tingkat kepuasan yang paling baik dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2023, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melaksanakan program Pendampingan SMK Pusat Keunggulan. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat SMK dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi negeri BLUD, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Sebagai bagian dari program ini, Perguruan Tinggi Pendamping (PTP) ditugaskan untuk mendampingi SMK yang menerima program SMK Pusat Keunggulan. Fokus utama pendampingan ini adalah pada aspek manajerial sekolah, khususnya dalam pengembangan sekolah.

<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</p> <p>NOMOR 76/D/O/2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PENUGASAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENDAMPING SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2023</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;</p> <p>b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan seleksi dan menetapkan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendampingan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pendamping Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2023;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>
--

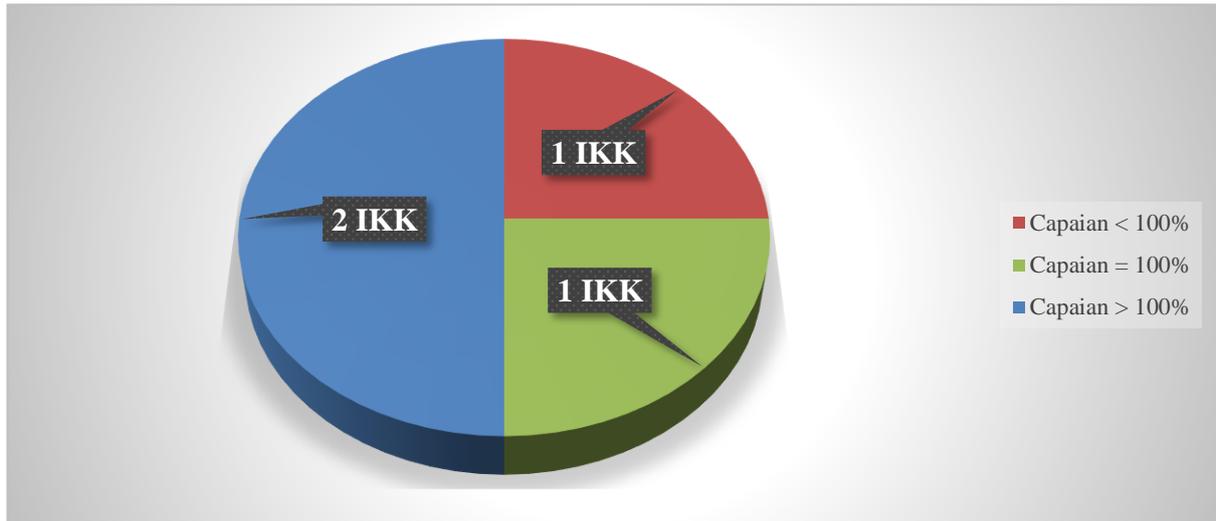
<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</p> <p>NOMOR 90/D/O/2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PENUGASAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENDAMPING SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2023 TAHAP II</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;</p> <p>b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan seleksi dan penetapan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendampingan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahap I;</p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi sebagai pendamping Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, telah dilakukan seleksi tahap II;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pendamping Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2023 Tahap II;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>
--

Gambar 3.3. SK Penugasan Perguruan Tinggi Pendamping

Diharapkan, dengan adanya pendampingan dari perguruan tinggi, Program SMK Pusat Keunggulan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas manajemen sekolah, sehingga setiap elemen di SMK dapat memenuhi perannya dengan baik. Akhirnya, SMK tersebut dapat menjadi pusat keunggulan seperti yang diharapkan.

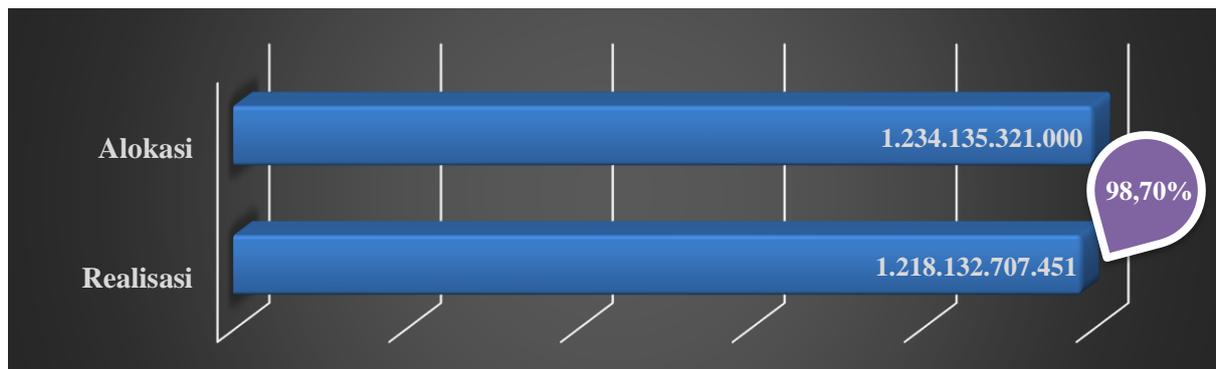
BAB IV - Penutup

Selama tahun 2023, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan keuangan Dit. SMK:



Gambar 4.1. Capaian IKK Dit. SMK

Dalam evaluasi kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, terdapat empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi acuan. Dari keempat IKK tersebut, tiga di antaranya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, ada satu IKK yang belum berhasil mencapai target. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang positif, masih ada ruang untuk peningkatan dalam satu area tertentu.



Gambar 4.2. Realisasi Anggaran

Gambar 4.2 memberikan ilustrasi tentang penyerapan anggaran oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2023. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa Direktorat SMK telah berhasil menyerap sejumlah Rp1.218.132.707.451,-. Jumlah ini setara dengan 98,70% dari total alokasi anggaran yang diberikan, yaitu sebesar Rp1.234.135.321.000,-.

Dengan kata lain, hampir seluruh anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat SMK telah digunakan secara efektif dalam tahun tersebut. Namun, masih ada sekitar 1,3% anggaran yang belum terserap. Ini menunjukkan bahwa meskipun Direktorat SMK telah berhasil

menggunakan sebagian besar anggarannya, masih ada sejumlah dana yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perencanaan program yang menjadi pendukung untuk pencapaian indikator kinerja agar lebih memperhatikan target serta implementasi pelaksanaannya, hal ini untuk mengantisipasi adanya ketidakcapaian target untuk pelaksanaannya;
2. Pembahasan keterlaksanaan program serta evaluasi *on going* untuk progresnya perlu dilakukan lebih detail melalui Evaluasi Triwulan, untuk kemudian menghasilkan rekomendasi strategi percepatannya sehingga lebih optimal hasil yang didapatkan untuk mendukung ketercapaian program dan kinerja;
3. Pelaksanaan anggaran agar lebih memperhatikan waktu penyampaian laporannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pencapaian program yang mempunyai dampak dalam mencapai indikator kinerja. Koordinasi rutin sebagai bentuk untuk melakukan evaluasi dari keterlaksanaan program dan strategi dapat diberikan sebagai upaya percepatan agar program berjalan tepat sasaran dan memenuhi target yang diberikan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. SDM merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan akuntabilitas sebuah instansi pemerintah, dengan peran pentingnya maka perlu adanya upgrading dan upskilling sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi. Beberapa pegawai akan diproyeksikan untuk mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang kerja yang digeluti berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat SMK;
2. Melakukan transisi pegawai sebagai upaya pemerataan informasi terkait program serta tugas dan fungsi pada setiap posisi yang dikerjakan dalam bentuk penguatan manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan (*continuous process*) yang berwawasan jauh ke depan (*forward looking*). Pada pokoknya, manajemen kinerja lebih memperhatikan kondisi kinerja ke masa depan dibandingkan permasalahan kinerja di waktu lampau. Hasil kinerja di waktu lampau digunakan sebagai acuan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan kinerja, memprediksi potensi kinerja, dan karir. Proses manajemen kinerja digunakan untuk mengukur level kinerja yang dicapai dan sebagai basis pengambilan keputusan yang terkait dengan sistem imbalan.
3. Penguatan Penilaian Kinerja dilakukan terhadap kinerja pegawai dan organisasi, oleh karenanya maka organisasi melakukan review terhadap pelaksanaan pekerjaan dari setiap pegawai. Review ini dilakukan terhadap pegawai (sumber daya manusia) dan organisasi secara berkala dengan tujuan untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi tentang seberapa jauh kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Direktorat SMK perlu menyampaikan kepada bidang pelaksana teknis harus lebih intensif dalam melakukan penagihan laporan kepada SMK penerima program sebagai upaya untuk mendapatkan data dukungan tambahan yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengukuran ketercapaian indikator kinerja Direktorat SMK.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wardani Sugiyanto

Jabatan : Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Kiki Yuliati



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	36
2	[SK 2] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	36
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 32.733.896.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 899.078.355.000
		TOTAL	Rp. 931.812.251.000

Jakarta,30 Januari 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Kiki Yulianti



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wardani Sugiyanto

Jabatan : Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliati

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Kiki Yuliati



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	36
2	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	36
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	94



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 31.228.345.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 1.202.906.976.000
		TOTAL	Rp. 1.234.135.321.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Kiki Yuliati



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Pengukuran Kinerja

a. Triwulan 1



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	36	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	36	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.931.812.251.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Mei 2023 sebesar **Rp. 21.058.216.114** atau **2.26%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Mei 2023 **Rp. 910.754.034.886**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan koordinasi dengan industri terkait skema untuk uji sertifikasi kepada peserta didik SMK sehingga lulusan SMK yang telah Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja dapat diakui dan terserap lebih baik. Beberapa kegiatan lainnya yang mendukung agar kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di antaranya: 1. Persiapan koordinasi awal dalam rangka persiapan penyusunan pedoman magang/prakerin siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

2. Persiapan penyusunan dan diujukannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan

Kendala / Permasalahan :

Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi untuk SMK Pusat Keunggulan karena masih menunggu terbitnya juknis dan penentuan seleksi SMK PK tahun 2023. Sementara untuk sertifikasi kepada Siswa SMK terkendala pada belum banyaknya lembaga/institusi yang melakukan sertifikasi pada bidang-bidang tertentu sebagai bentuk peningkatan Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melalui pelibatan dunia kerja terutama industri mitra untuk dapat memberikan training berikut sertifikasi kepada guru maupun siswa sehingga bentuk perolehan kompetensi sesuai dengan bidangnya

- Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

B . SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan: 1. Telah dilakukannya koordinasi awal dalam rangka



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

perencanaan pelaksanaan kegiatan

2. Telah disusun dan diajukannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan. - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan: 1. Penerbitan juknis bantuan pemerintah SMK PK Tahun 2023 2. Pelaksanaan seleksi SMK PK Tahun 2023 mulai dari pembukaan pengajuan SMK PK tahun 2023 oleh SMK hingga proses seleksi dan penentuan serta pengajuan untuk pembuatan SK penetapan. - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0: 1. Telah dilakukannya koordinasi awal dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan

2. Telah disusun dan diajukannya petunjuk teknis bantuan pemerintah terkait kegiatan untuk segera diterbitkan.

Kendala / Permasalahan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu terbitnya juknis. - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Sejauh ini belum ada kendala berarti karena masih menunggu terbitnya SK Penetapan SMK PK 2023 sehingga bisa meneruskan ke tahap selanjutnya. - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu proses seleksi setelah terbitnya juknis.

Strategi / Tindak Lanjut :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

- Merencanakan pola kegiatan pemenuhan dan perbaikan dokumen SAKIP menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak yang berkepentingan
- Reviu terhadap renstra, hal ini dikarenakan ada perubahan renstra Kemendikbudristek sehingga perlu dilakukan revisi renstra yang sudah ada menyesuaikan dengan target kinerja yang ada

Kendala / Permasalahan :

- Belum adanya SK Tim SAKIP Direktorat SMK sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi secara terpusat terutama dalam hal pengumpulan data pemenuhan dokumen SAKIP
- Beberapa program dengan pola intervensi yang diberikan kepada sekolah perlu disesuaikan karena terkait perubahan tugas dan fungsi satker

Strategi / Tindak Lanjut :

- Melakukan koordinasi terkait pembentukan Tim SAKIP dengan pimpinan sehingga pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja
- Melakukan reviu dan revisi ketika memang ada perubahan indikator serta target kinerja

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

Melakukan review rutin terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.

Kendala / Permasalahan :

Penyerapan masih belum sesuai rencana yang diharapkan karenanya adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Secara umum progres kegiatan di Direktorat SMK sudah berjalan dengan baik, namun beberapa kendala masih terjadi di luar perencanaan masih ada. Sehingga perlu dilakukan strategi yang tepat untuk percepatan pelaksanaan capaian kegiatan dan penyerapan anggaran. Semua pokok agar rutin untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam capaian kinerja.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 15 Mei 2023

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Triwulan 2



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	36	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	36	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	TW2 : -	TW2 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.931.812.251.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 18 Juli 2023 sebesar **Rp. 365.977.499.826** atau **39.28%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 18 Juli 2023 **Rp. 565.834.751.174**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya dapat diukur dari jumlah lulusan SMK yang dapat diterima di dunia kerja. Salah satu strategi agar lulusan SMK dapat diterima di dunia kerja siswa SMK perlu dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mengukur capaian tersebut, salah satu dilakukan adalah melalui uji sertifikasi kompetensi kepada peserta didik yang akan lulus, sampai dengan saat ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa: 1. Rapat koordinasi dengan industri terkait skema untuk uji sertifikasi kepada peserta didik SMK sehingga lulusan SMK yang telah Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja dapat diakui dan terserap lebih baik. 2. Telah dilakukan penyusunan pedoman magang/prakerin siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 3. Telah diterbitkan SK tahap 1 bagi 170 SMK yang mendapatkan program sertifikasi kompetensi siswa

Kendala / Permasalahan :

- Adanya penambahan anggaran melalui BA BUN untuk menambah sasaran SMK PK sehingga dilakukan seleksi tahap berikutnya bagi SMK PK tahun 2023. - Sasaran penerima program yang sebelumnya direncanakan siswa yang lulus tahun 2023 tidak dapat terlaksana dikarenakan peserta didik sudah dinyatakan kelulusannya, sehingga pengajuan penerima uji sertifikasi perlu dilakukan revisi

Strategi / Tindak Lanjut :

- Menggandeng pelibatan dunia kerja atau industri yang menjadi mitra sekolah untuk dapat memberikan pemadanan dukungan kepada SMK PK dengan kompetensi yang sesuai bidangnya
- Melakukan revisi terhadap sasaran peserta didik yang akan diberikan uji sertifikasi.

B . SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan: 1. Telah di-SK-kan SMK penerima program untuk tahap 1



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

sebanyak 120 sekolah dan tahap 2 sebanyak 120 sekolah. 2. SMK yang ditetapkan sebagai penerima program telah diberikan bimbingan teknis pada Juni 2023 - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan: 1. Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Baru SPD Tahap 1 sebanyak 107 SMK dan Tahap 2 sebanyak 52 SMK. 2. Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Lanjutan SPD sebanyak 63 SMK. 3. Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Lanjutan Reguler Tahap 1 sebanyak 779 SMK, Tahap 2 sebanyak 159 SMK, dan Tahap 3 sebanyak 78 SMK. 4. Sudah dilaksanakan bimtek SMK PK Baru SPD Tahap 1 22-24 Mei dan Tahap 2 5-7 Juni serta SMK PK Lanjutan SPD - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0: 1. Telah diterbitkan SK Penerima Tahap I untuk sebanyak 39 SMK dan SK Penerima Tahap II untuk sebanyak 41 SMK. 2. Telah dilakukan bimbingan teknik untuk penerima Tahap 1 pada tanggal 19 Juni 2023

Kendala / Permasalahan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Sejahter ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu penyaluran - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Sejahter ini belum ada kendala berarti dan sedang menunggu proses penyaluran dan pelaksanaan oleh penerima bantuan - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Sejahter ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu proses penyaluran

Strategi / Tindak Lanjut :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

C . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

1. Rapat koordinasi dengan tim manajemen dan SPI untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan capaian kinerja direktorat rutin triwulanan 2. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen untuk pemenuhan Evaluasi AKIP tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Sebagian dokumen pendukung pelaksanaan program belum ada sehingga masih ada sebagian dokumen yang belum bisa dipenuhi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk pemenuhan dokumen agar bisa ada sebelum batas waktu pengumpulan kegiatan.

D . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

Melakukan review rutin terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.

Kendala / Permasalahan :

Penyerapan masih belum sesuai rencana yang diharapkan karenanya adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Progres pelaksanaan kegiatan secara umum masih berjalan sesuai dengan timeline yang diagendakan, adanya keterlambatan maupun penambahan kegiatan secara bertahap dikarenakan adanya tambahan anggaran melalui BA BUN. Sehingga perlu dilakukan pengendalian serta strategi yang lebih tepat dalam rangka memenuhi capaian target sasaran kinerja dan penyerapan anggaran. Administrasi hendaknya dikelola dengan baik untuk memenuhi capaian target kinerja agar nilainya lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 18 Juli 2023

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Wardani Sugiyanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

c. Triwulan 3



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	36	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	36	TW3 : 0	TW3 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	TW3 : -	TW3 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.1.234.135.321.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 901.694.435.150** atau **73.06%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 332.440.885.850**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Indikator keberhasilan untuk pendidikan kejuruan diantaranya dapat diukur dari jumlah lulusan SMK yang dapat diterima di dunia kerja. Untuk mencapai target pada indikator tersebut beberapa strategi diberikan agar lulusan SMK dapat diterima di dunia kerja termasuk perlunya dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mengukur capaian tersebut, salah satu dilakukan adalah melalui uji sertifikasi kompetensi kepada peserta didik yang akan lulus, sampai dengan saat ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa: 1. Rapat koordinasi dengan industri terkait skema untuk uji sertifikasi kepada peserta didik SMK sehingga lulusan SMK yang telah tersertifikasi terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja dapat diakui dan terserap lebih baik. 2. Telah dilakukan penyusunan pedoman magang/prakerin siswa yang merupakan bagian dari pembelajaran agar lulusan SMK memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
3. Pelaksanaan program sertifikasi kompetensi siswa di 170 SMK dengan sasaran sebanyak 30.000 siswa
4. Seleksi melalui viera untuk pelaksanaan sertifikasi bahasa Inggris TOEIC dan bahasa asing lainnya.

Kendala / Permasalahan :

- Untuk sertifikasi bahasa asing lainnya tidak didapatkan standar biaya sehingga menyulitkan sekolah untuk menyusun rencana serta jadwal pelaksanaan uji sertifikasinya yang tidak sesuai tahun anggaran. - Sasaran penerima program yang sebelumnya direncanakan siswa yang lulus tahun 2023 tidak dapat terlaksana dikarenakan peserta didik sudah dinyatakan kelulusannya, sehingga pengajuan penerima uji sertifikasi perlu dilakukan revisi

Strategi / Tindak Lanjut :

- Beberapa perlu dilakukan upaya fleksibilitas penggunaan anggaran sehingga dapat menyesuaikan dengan jadwal rutin lembaga pelaksana sertifikasi bahasa
- Melakukan revisi terhadap sasaran peserta didik yang akan diberikan uji sertifikasi.

B . SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Progress / Kegiatan :

- Pelaksanaan program SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan: 1. Pelaksanaan program oleh sekolah penerima bantuan sebanyak 240 sekolah dengan diberikan pemantauan pelaksanaan kegiatan di sekolah sehingga diharapkan sesuai dengan tujuan program. 2. SMK pelaksana diharapkan menjalin kerjasamanya dengan industri sampai dengan UMKM sehingga program dapat terlaksana melalui jalinan kemitraan yang berkesinambungan. - SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan: 1. Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Baru SPD Tahap 1 sebanyak 107 SMK dan Tahap 2 sebanyak 52 SMK, Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Lanjutan SPD sebanyak 63 SMK, Sudah diterbitkan SK Penetapan SMK PK Lanjutan Reguler Tahap 1 sebanyak 779 SMK, Tahap 2 sebanyak 159 SMK, dan Tahap 3 sebanyak 78 SMK, Sudah dilaksanakan bimtek SMK PK Baru SPD Tahap 1 22-24 Mei dan Tahap 2 5-7 Juni serta SMK PK Lanjutan SPD

2. Pelaksanaan kegiatan oleh sekolah berupa penguatan pembelajaran dengan pelibatan instruktur dari dunia industri, peningkatan kualitas guru melalui magang serta pelatihan sesuai dengan kompetensinya serta penyusunan bahan ajar dengan melibatkan dunia industri. - SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0: 1. Telah diterbitkan SK Penerima Tahap I untuk sebanyak 39 SMK dan SK Penerima Tahap II untuk sebanyak 41 SMK dan telah dilakukan bimbingan teknik untuk penerima Tahap 1 pada tanggal 19 Juni 2023

2. Pelaksanaan kegiatan oleh sekolah berupa penguatan pembelajaran dengan pelibatan instruktur dari dunia industri, peningkatan kualitas guru melalui magang serta pelatihan sesuai dengan kompetensinya serta penyusunan bahan ajar dengan melibatkan dunia industri.

Kendala / Permasalahan :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu penyaluran

- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Sejauh ini belum ada kendala berarti dan sedang menunggu proses penyaluran dan pelaksanaan oleh penerima bantuan

- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Sejauh ini belum ada kendala berarti yang dihadapi karena masih menunggu proses penyaluran

Strategi / Tindak Lanjut :

- SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi rutin dengan tim manajemen dan SPI untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan capaian kinerja direktorat rutin triwulanan, untuk mengetahui progres capaian dari program-program dalam mendukung indikator

2. Melakukan indentifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan Evaluasi AKIP tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Beberapa dokumen pendukung pelaksanaan program belum ada sehingga masih ada sebagian dokumen yang belum bisa dipenuhi, hal ini mengakibatkan nilai SAKIP dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja mandiri menjadi turun sehingga perlu adanya upaya pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk pemenuhan dokumen agar bisa ada sebelum batas waktu pengumpulan kegiatan.

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

1. Melaksanakan review antara target dan capaian pada sistem SAKTI untuk penyesuaian dengan realisasi riil, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan, 2. Melakukan review rutin terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran.

Kendala / Permasalahan :

Penyerapan masih belum sesuai rencana yang diharapkan karenanya adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Upaya untuk memenuhi target terkait persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja perlu diberikan intervensi-intervensi yang langsung dapat dirasakan untuk peserta didik. Adanya transformasi pembelajaran di sekolah melalui penerapan kurikulum merdeka diharapkan mampu memberikan pengalaman dari peserta didik sehingga lebih siap untuk berkompetisi di dunia kerja dengan bekal kompetensi yang lebih baik. Selain itu, upaya-upaya pengukuran capaian melalui sumber data yang valid perlu disiapkan untuk pelaporan kinerja dari Direktorat

2. Untuk mencapai target SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, SMK yang telah ditunjuk sebagai Pusat Keunggulan didorong agar mampu memberikan imbas dari praktik baiknya kepada sekolah di sekitar. Kegiatan berupa penyaluran dan kemitraan dengan dunia industri diharapkan dapat diterapkan secara massif di sekolah yang masih belum menjalin kerjasama dengan dunia



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

kerja, sehingga transformasi dapat terjadi di satuan pendidikan secara nasional. Pelibatan satker lainnya perlu diupayakan untuk mengkoordinasikan program-program yang dapat dijalankan secara sinergi sehingga sasarannya lebih tepat. 3. Agar setiap pegawai lebih sering untuk melakukan review dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ketika terdapat program yang tidak berjalan sesuai tujuan dapat segera diberikan tindakan dan upaya perbaikannya. Tim SPI juga diharapkan berupaya aktif untuk membantu memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan program oleh Direktorat. Hal ini adalah upaya untuk menjaga capaian nilai SAKIP dan NKA sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Wardani Sugiyanto

d. Triwulan 4



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 1.1] Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	36	TW4 : 36	TW4 : 38,64
2	[SK 2.0] Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja	[IKK 2.1] Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja	%	36	TW4 : 36	TW4 : 37,56
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : BB
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai	94	TW4 : 94	TW4 : 90,35

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.1.234.135.321.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 1.218.132.707.451** atau **98,7%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 16.002.613.549**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

- IKK 1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Ketercapaian indikator kinerja kompetensi lulusan SMK merupakan hasil dari beberapa intervensi program yang diberikan kepada penerima manfaat yaitu satuan pendidikan SMK. Dalam pengukurannya diketahui SMK yang diberikan intervensi melalui program SMK untuk menjadi Pusat Keunggulan merupakan penyumbang utama untuk lulusannya yang memenuhi kriteria dengan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Selain itu, terdapat juga program sertifikasi yang diberikan kepada peserta didik SMK untuk kompetensi yang didapatkan. Namun sarasannya hanya memenuhi 2% dari populasi lulusan SMK untuk tiap tahunnya, sementara dengan adanya program yang mendorong kerjasama link and match antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang lebih intensif dan komprehensif berhasil membentuk ekosistem pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja turut aktif untuk melakukan penjaminan terhadap mutu lulusan SMK yang akhirnya membentuk sistem pendidikan kejuruan yang harmonis antara pemasok SDM dengan pengguna SDM lulusan SMK.

Kendala / Permasalahan :

Pada IKK 1 terkait persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja merupakan peserta didik yang mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan masa studi di SMK. Dalam hal ini intervensi yang dapat diberikan Direktorat SMK hanya sebanyak 2% dari populasi lulusan SMK, sehingga diperlukan pengumpulan pendataan lainnya untuk menghitung ketercapaian yang diberikan dari sumber intervensi lainnya. Untuk memenuhi data yang diperlukan maka perlu dilakukan upaya menggali dari sumber-sumber data yang dapat untuk dipertanggungjawabkan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk pengumpulannya.

Strategi / Tindak Lanjut :

Data yang dibutuhkan dapat digali melalui sumber lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan diantaranya melalui penjarangan langsung terkait data yang dibutuhkan kepada SMK penerima pada saat pelaporan hasil laporan pelaksanaan program. Tentunya data yang didapat perlu dikomparasikan dengan data lainnya yang relevan melalui dapodik. Langkah berikutnya perlu adanya penguatan serta peningkatan pemahaman kepada SMK agar melakukan pengisian data secara lengkap kondisi sekolah sebagaimana yang dimintakan pada isian dapodik satuan pendidikan.

B . SK 2.0 Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- IKK 2.1 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja

Progress / Kegiatan :

Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 merupakan bentuk dari satuan pendidikan SMK yang telah melaksanakan kerjasama link and match dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Program-program yang telah diberikan sebagai bentuk intervensi bertujuan agar kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diantaranya: 1. Pelaksanaan sertifikasi baik untuk kompetensi maupun Bahasa asing perlu dilakukan sebagai bentuk standarisasi terhadap lulusan SMK, dalam pelaksanaannya sebanyak 30.000 siswa diberikan sertifikasi untuk kompetensi keahlian, sementara 16.960 siswa diberikan sertifikasi Bahasa Asing. Hal ini tentunya tidak semua siswa yang diberikan sertifikasi lulus dan mendapatkan sertifikat, namun dari data yg dikumpulkan tingkat kelulusannya peserta didiknya lebih dari 98%. Nilai ini menunjukkan bahwa kompetensi keahlian dari hasil pembelajaran di SMK sudah dapat memenuhi standar dari lembaga sertifikasi. 2. Untuk menciptakan lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusannya dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP maka diperlukan adanya satuan pendidikan dengan kriteria dan kemampuan unggul dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Program SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan merupakan kebijakan yang diberikan untuk menciptakan SMK sebagai lembaga yang diakui dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyalarsan dengan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Sebanyak 1.851 SMK diberikan intervensi program ini untuk menjadi pusat keunggulan yang mampu mencetak lulusan yang siap kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. 3. Dalam meningkatkan kemampuan dan peminatan lulusan SMK untuk menjadi entrepreneurship maka perlu adanya pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sebagai modal dan bekal awal, sehingga nantinya lulusannya akan siap untuk menjadi wirausahawan. Program SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dilaksanakan dalam rangka membantu sekolah untuk memberikan pembelajaran melalui proyek-proyek yang dikerjakan oleh peserta didik dalam membentuk embrio unit usaha secara mandiri. Pada tahun 2023 sebanyak 240 SMK yang diberikan intervensi dana bantuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki kemampuan dan peminatan untuk berwirausaha. 4. Perkembangan teknologi mempengaruhi dunia industri sehingga perubahan ini juga perlu disiapkan pembelajarannya di dunia pendidikan sehingga penyiapan SDM sesuai dengan kebutuhan terkait sumber daya yang mengoperasikannya nanti. Memasuki era Revolusi Industri 4.0 maka pembelajaran di SMK perlu disesuaikan untuk mendukung lulusan yang siap kerja dengan kompetensi keahlian yang mumpuni dan berdaya saing. Program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 diberikan kepada satuan pendidikan kejuruan bertujuan untuk membentuk pola pembelajaran serta membantu peserta didik untuk mempunyai kompetensi dan pengetahuan terkait teknologi industri 4.0. Pada tahun 2023 sebanyak 31 SMK baru dan 49 SMK lanjutan yang diberikan intervensi untuk mengembangkan pembelajaran dan membekali peserta didik dengan kompetensi industri 4.0. Dengan kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan terkini di dunia industri, maka tingkat keberkerjaan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP dalam satu tahun setelah kelulusannya dapat tercapai.

Kendala / Permasalahan :

Berkaitan dengan persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja merupakan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya satuan pendidikan SMK diarahkan untuk mempunyai mitra dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, sehingga dalam implementasi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada saat masuk ke pasar kerja. Namun tidak semua mitra kerja sama Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai SDM yang cukup dan mumpuni untuk melaksanakan kolaborasi terkait penerapan pembelajaran link and match di sekolah. Di samping itu, masih minimnya pengisian data dapodik terkait isian pelaksanaan kurikulum menjadikan pengumpulan data pendukung untuk menghitung capaian kinerja memerlukan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk: - SMK yang Mengembangkan Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 Rencana yang sudah ada terus dipantau perkembangannya sehingga diharapkan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi rutin dengan tim manajemen dan SPI untuk melakukan evaluasi keterlaksanaan capaian kinerja direktorat rutin triwulanan, untuk mengetahui progres capaian dari program-program dalam mendukung indikator

2. Melakukan indentifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan Evaluasi AKIP tahun 2023.

Kendala / Permasalahan :

Beberapa dokumen pendukung pelaksanaan program belum ada sehingga masih ada sebagian dokumen yang belum bisa dipenuhi, hal ini mengakibatkan nilai SAKIP dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja mandiri menjadi turun sehingga perlu adanya upaya pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi dengan bagian terkait untuk pemenuhan dokumen agar bisa ada sebelum batas waktu pengumpulan kegiatan.

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Progress / Kegiatan :

1. Melaksanakan review antara target dan capaian pada sistem SAKTI untuk penyesuaian dengan realisasi riil, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan serta penambahan anggaran melalui BA BUN, 2. Melakukan review rutin terkait kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

3. Melakukan pemantauan terhadap administrasi keuangan serta pertanggungjawaban agar sesuai dengan jadwal, disamping itu dilakukan optimalisasi terhadap output dari pelaksanaan program.

Kendala / Permasalahan :

1. Adanya pelaporan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang memerlukan dokumen data dukung dari pihak ketiga, seringkali menyebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian sehingga untuk penyelesaian tagihan, belanja kontraktual dan pengelolaan UP/TUP mendapatkan nilai yang rendah
2. Penyerapan masih belum sesuai rencana yang diharapkan karenanya adanya perubahan metode pelaksanaan serta perubahan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Memberikan bimbingan dan diseminasi lebih lanjut kepada pelaksana dan tim administrasi pelaporan penggunaan anggaran agar dapat lebih intensif lagi dalam melakukan penagihan kepada pihak yang memang mempunyai keterlibatan untuk menyiapkan dokumen pendukung
2. Melakukan penyesuaian kembali terkait rencana penyerapan dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Beberapa hal berkaitan dengan capaian kinerja Direktorat SMK perlu dievaluasi lebih komprehensif sehingga kedepannya pelaksanaan program dapat lebih akurat dan tepat sasaran. Hal ini agar dapat menjadi pendukung untuk mengoptimalkan capaian kinerja sesuai target, beberapa rekomendasi untuk upaya perbaikan diantaranya: 1. Terkait Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, mungkin perlu dioptimalkan sumber-sumber pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dampak dari intervensi program yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dengan lebih baik. Program pendukung yang mempunyai dampak signifikan dalam pencapaian kinerja dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun berikutnya. 2. Terkait Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja, perlu dilakukan evaluasi yang lebih baik untuk memetakan program-program mana yang mempunyai dampak sebagai upaya peningkatan capaian kinerja tersebut. Sehingga di tahun berikutnya program tersebut dapat dioptimalkan pelaksanaannya untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik. 3. Capaian Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan berkaitan dengan administrasi yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja. Sekirang tim administrasi harus lebih baik lagi untuk melakukan pengadministrasian terhadap setiap kegiatan yang berhubungan dengan dokumen tersebut. 4. Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan merupakan potret dari administrasi terhadap pelaksanaan keuangan, dengan capaian yang tidak memenuhi target maka pihak pengelola keuangan harus lebih ekstra kerja keras lagi. Capain tahun ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, artinya memang ada penambahan beban kerja maupun anggaran dan ini perlu mendapatkan perhatian dari tim pengelola keuangan. Kedepannya sekiranya memang terdapat dokumen yang berkaitan dengan pihak ketiga, tim pengelola keuangan harus benar-benar menagihkan dan mengingatkan agar pelaporan keuangan dapat lebih baik sehingga capaian indikator ini dapat lebih meningkat.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Wardani Sugiyanto

4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja telah Direviu

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Januari 2024
Ketua Tim SPI Direktorat SMK


Sunardi
NIP 197503272007011001